

ABSTRAK

ANALISIS KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA MEMPERPANJANG INSENTIF KENDARAAN LISTRIK MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2023

Oleh

RIZA FARIS ABQORI

Perkembangan pasar kendaraan Indonesia mulai mengalami transisi menjadi kendaraan listrik. Munculnya produsen baru dalam pasar kendaraan listrik, membuat pemerintah melakukan perpanjangan insentif untuk kendaraan *Completely Built-Up* atau CBU, hal ini dirasakan tidak adil oleh produsen yang telah memenuhi syarat FDI nya untuk mendapatkan insentif dengan melaksanakan *Completely Knock Down* atau CKD di Indonesia, karena adanya ketidakpastian terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian ini menganalisis kebijakan investasi mobil listrik di Indonesia, melalui implementasinya terhadap konsep *foreign direct investment*, yang menekankan sebagai jalan untuk terjadinya perubahan, dan menimbulkan pertumbuhan perekonomian dengan adanya transfer teknologi dan peningkatan produktivitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analisis, serta didukung data sekunder yang berasal dari situs web pangkalan data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

Hasil penelitian oleh penulis menunjukkan bahwa *foreign direct investment* merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 menjadi pedoman terhadap investasi kendaraan listrik di Indonesia. Indonesia mempertimbangkan perpanjangan insentif dalam upaya mencapai target pengurangan emisi karbon, menekankan hilirisasi nikel, serta merupakan jalan yang strategis untuk Indonesia mencapai target kendaraan listrik pada tahun 2030.

Kata Kunci: *Foreign Direct Investment*, Indonesia, Investasi, Kebijakan, Kendaraan Listrik

ABSTRACT

ANALYSIS THE INTEREST OF THE INDONESIAN GOVERNMENT EXTENDS THE ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES THROUGH PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 79 OF 2023

By

RIZA FARIS ABQORI

The development of the Indonesian vehicle market has begun to transition to electric vehicles. The emergence of new manufacturers in the electric vehicle market has made the government extend incentives for Completely Built-Up or CBU vehicles, this is felt to be unfair by manufacturers who have met the FDI requirements to obtain incentives by implementing Completely Knock Down or CKD in Indonesia, due to the uncertainty of policies implemented by the Indonesian government.. This study analyzes the electric car investment policy in Indonesia, through its implementation of the concept of foreign direct investment, which emphasizes it as a path for change, and creates economic growth with technology transfer and increased productivity. This study uses a qualitative approach method, with a descriptive analysis method, and is supported by secondary data from the website of the Republic of Indonesia's Audit Board database regarding Presidential Regulation Number 79 of 2023. The results of the author's research show that foreign direct investment is a strategy used by the Indonesian Government. By issuing the Presidential Regulation Number 79 of 2023 as a guideline for electric vehicle investment in Indonesia. Indonesia is considering extending incentives in an effort to achieve the target of reducing carbon emissions, emphasizing nickel downstreaming, and is a strategic path for Indonesia to achieve the electric vehicle target by 2030.

Keywords: *Foreign Direct Investment, Indonesia, Investment, Policy, Electric Vehicles*